

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL


NOMOR 181 /KEP/B4/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 135/KEP/B4/2022 TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/792/M.SM.02.00/2022 tanggal 29
September 2022 hal Persetujuan Penetapan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dilakukan
penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 Tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 Tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
- 

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 135 NOMOR 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 181/KEP/B4/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 135/KEP/B4/2022 TENTANG KELAS

JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
1.	Kepala	17	Rp. 26.324.000,00
2.	Sekretaris Utama	16	Rp. 20.695.000,00
3.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	16	Rp. 20.695.000,00
4.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	16	Rp. 20.695.000,00
5.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	16	Rp. 20.695.000,00
6.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	16	Rp. 20.695.000,00

13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
7.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	16	Rp. 20.695.000,00
8.	Inspektur Utama	16	Rp. 20.695.000,00
9.	Kepala Biro Perencanaan	14	Rp. 11.670.000,00
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	14	Rp. 11.670.000,00
11.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	14	Rp. 11.670.000,00
12.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	14	Rp. 11.670.000,00
13.	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	14	Rp. 11.670.000,00
14.	Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	14	Rp. 11.670.000,00
15.	Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk	14	Rp. 11.670.000,00
16.	Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	14	Rp. 11.670.000,00
17.	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	14	Rp. 11.670.000,00
18.	Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana	14	Rp. 11.670.000,00
19.	Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	14	Rp. 11.670.000,00
20.	Direktur Bina Kesehatan Reproduksi	14	Rp. 11.670.000,00
21.	Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus	14	Rp. 11.670.000,00
22.	Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak	14	Rp. 11.670.000,00
23.	Direktur Bina Ketahanan Remaja	14	Rp. 11.670.000,00
24.	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	14	Rp. 11.670.000,00
25.	Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	14	Rp. 11.670.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
26.	Direktur Teknologi Informasi dan Data	14	Rp. 11.670.000,00
27.	Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga	14	Rp. 11.670.000,00
28.	Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	14	Rp. 11.670.000,00
29.	Direktur Pelaporan dan Statistik	14	Rp. 11.670.000,00
30.	Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan	14	Rp. 11.670.000,00
31.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	Rp. 11.670.000,00
32.	Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	Rp. 11.670.000,00
33.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	14	Rp. 11.670.000,00
34.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	14	Rp. 11.670.000,00
35.	Inspektur Wilayah I	14	Rp. 11.670.000,00
36.	Inspektur Wilayah II	14	Rp. 11.670.000,00
37.	Inspektur Wilayah III	14	Rp. 11.670.000,00
38.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi	14	Rp. 11.670.000,00
39.	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi	12	Rp. 7.271.000,00
40.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	12	Rp. 7.271.000,00
41.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	11	Rp. 5.183.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
42.	Kepala Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	11	Rp. 5.183.000,00
43.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	9	Rp. 3.781.000,00
44.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	9	Rp. 3.781.000,00
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9	Rp. 3.781.000,00
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	9	Rp. 3.781.000,00
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	9	Rp. 3.781.000,00

(i)

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
48.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	9	Rp. 3.781.000,00
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	9	Rp. 3.781.000,00
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	9	Rp. 3.781.000,00
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	Rp. 3.781.000,00

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


HASTO WARDOYO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 181/KEP/B4/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 135 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN BADAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
4.	Analisis Hukum Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
6.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
7.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	Rp. 11.670.000,00.
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
11.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
12.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
14.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00.
15.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.928.000,00.
16.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil/Pelaksana	6	Rp. 2.702.000,00.
17.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
18.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
19.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
20.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00.
21.	Pranata Keuangan APBN Mahir/Pelaksana Lanjutan	8	Rp. 3.319.000,00.
22.	Pranata Keuangan APBN Terampil/Pelaksana	7	Rp. 2.928.000,00.
23.	Arsiparis Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
24.	Arsiparis Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
25.	Arsiparis Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
26.	Arsiparis Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
27.	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.928.000,00.
28.	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6	Rp. 2.702.000,00.
29.	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama	14	Rp. 11.670.000,00.
30.	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
31.	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
32.	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
33.	Penata Ruang Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
34.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Utama	13	Rp. 8.562.000,00.
35.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
36.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
37.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
38.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
39.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
40.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
41.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14	Rp. 11.670.000,00.
42.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
43.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
44.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
45.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14	Rp. 11.670.000,00.
46.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
47.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
48.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
49.	Perencana Ahli Utama	14	Rp. 11.670.000,00.
50.	Perencana Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
51.	Perencana Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
52.	Perencana Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
53.	Penyuluh KB Ahli Utama	13	Rp. 8.562.000,00.
54.	Penyuluh KB Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
55.	Penyuluh KB Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
56.	Penyuluh KB Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
57.	Penyuluh KB Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00.
58.	Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.928.000,00.
59.	Penyuluh KB Terampil/Pelaksana	6	Rp. 2.702.000,00.
60.	Penyuluh KB Pemula	5	Rp. 2.493.000,00.
61.	Pranata Humas Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
62.	Pranata Humas Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
63.	Pranata Humas Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
64.	Pranata Humas Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00.
65.	Pranata Humas Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.928.000,00.
66.	Pranata Humas Terampil/Pelaksana	6	Rp. 2.702.000,00.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
67.	Pranata Komputer Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
68.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
69.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
70.	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	8	Rp. 3.319.000,00.
71.	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	7	Rp. 2.928.000,00.
72.	Pranata Komputer Pemula	6	Rp. 2.702.000,00.
73.	Pustakawan Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
74.	Pustakawan Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
75.	Pustakawan Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
76.	Pustakawan Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00.
77.	Pustakawan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.928.000,00.
78.	Pustakawan Terampil/Pelaksana	6	Rp. 2.702.000,00.
79.	Statistisi Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
80.	Statistisi Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
81.	Statistisi Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
82.	Widyaiswara Ahli Utama	14	Rp. 11.670.000,00.
83.	Widyaiswara Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00.
84.	Widyaiswara Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00.
85.	Widyaiswara Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 702 /M.SM.02.00/2022
Lampiran : 5 (lima) daftar
Hal : **Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional**

20 September 2022

Yth. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
di
Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : B-3069/OT.03/B4/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan BKKBN, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan beberapa kali penyesuaian dokumen usulan hasil evaluasi jabatan oleh Tim Evaluasi Jabatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim Evaluasi Jabatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menindaklanjutinya dengan merevisi dokumen usulan hasil evaluasi jabatan tersebut terutama berkaitan dengan validasi data jabatan yang diusulkan dan faktor evaluasi jabatan.
2. Hasil evaluasi jabatan pada angka 1 di atas sebagaimana terlampir, telah divalidasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
3. Dalam rangka tertib administrasi, kiranya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional segera menindaklanjuti dengan:
 - a. Menyusun Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang kelas jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada lampiran surat persetujuan ini; dan
 - b. Berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional berkaitan dengan penggunaan dan kebutuhan formasi jabatan fungsional di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat melakukan dan mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila:
 - a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;

- b. Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
 - c. Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
5. Selanjutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diminta untuk melaksanakan manajemen pegawai ASN yang berdasarkan pada sistem Merit dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi dan agar dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Abdullah Azwar Anas

Tembusan:

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I
Surat Menteri PANRB
Nomor : B / 702 /M.SM.02.00/2022
Tanggal : 29 September 2022

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	17	0
2	16	0
3	15	0
4	14	8
5	13	0
6	12	51
7	11	0
8	10	36
9	9	0
10	8	43
11	7	0
12	6	0
13	5	0
14	4	0
15	3	0
16	2	0
17	1	0
TOTAL		138

Menteri Pendayagunaan Negara
dan Reformasi Birokrasi



Abdullah Azwar Anas

Lampiran II
Surat Menteri PANRB
Nomor : B / 702 / M.SM.02.00/2022
Tanggal : 20 September 2022

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	12	1	
2	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi	12	32	
TOTAL			33	



DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	Widyaiswara Ahli Pertama	Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB	8	43
2	Widyaiswara Ahli Muda	Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB	10	36
3	Widyaiswara Ahli Madya	Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB	12	18
4	Widyaiswara Ahli Utama	Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB	14	8
TOTAL				105

Menteri Pendayagunaan Negara
dan Reformasi Birokrasi
Abdullah Azwar Anas

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1		Faktor 2		Faktor 3		Faktor 4				Faktor 5		Faktor 6	
				Ruang Lingkup + Dampak		Pengaturan Organisasi		Wewenang, Penyeliaan dan Managerial		A. Sifat Hubungan		B. Tujuan Hub		Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Kondisi Lain	
				(Level 1-5)		(Level 1-3)		(Level 1-3)		(Level 1-4)		(Level 1-4)		(Level 1-6)		(Level 1-6)	
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	12	2.105	2	350	1	100	1	450	1	25	3	100	4	505	2	575
2	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi	12	2.165	2	350	1	100	2	775	1	25	3	100	4	505	1	310

Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi

Abdullah Azwar Anas

Lampiran V
 Surat Menteri PANRB
 Nomor : B/ 702 /M.SM.02.00/2022
 Tanggal : 29 September 2022

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1		Faktor 2		Faktor 3		Faktor 4		Faktor 5		Faktor 6		Faktor 7		Faktor 8		Faktor 9	
				Pengetahuan (Level 1-9)		Pengawasan (Level 1-5)		Pedoman (Level 1-5)		Kompleksitas (Level 1-6)		Ruang Lingkup & (Level 1-6)		Hubungan Pribadi (Level 1-4)		Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
1.	Widyaiswara Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
2.	Widyaiswara Ahli Muda	10	1665	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	1	20	1	5	1	5
3.	Widyaiswara Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
4.	Widyaiswara Ahli Utama	14	2950	7	1250	5	650	4	450	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 Abdullah Azwar Anas